

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes terdiri dari tiga komponen yaitu; (1) pendapatan desa, (2) belanja desa; (3) pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa dari semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran selanjutnya (Permendagri nomor 20 tahun 2018)

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan setiap tahun, dengan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun dengan

Peraturan Desa. Adapun pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut ditetapkan oleh Bupati.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana Desa yang diterima oleh desa dari pemerintah jumlahnya cukup besar sebesar 2 Milyar tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya dilansir di detik.com (Tri Ispranoto,2017). Di desa Karangpakuan untuk anggaran tahun 2020 mendapat dana dari pemerintah sekitar 1,4 Milyar ini merupakan dana yang cukup besar, maka harus dikelola secara efisien dan efektif, dan harus adanya transparan, akuntabel dan partisipatif dalam mengelola keuangan desa.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia termasuk di tingkat desa adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat. Tuntutan akuntabilitas tersebut memberikan dorongan bagi instansi publik agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*). Bentuk dari akuntabilitas tersebut adalah bagaimana para pemangku kekuasaan bisa “amanah”. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan (Mahmudi, 2007).

Ada beberapa kasus dari lemahnya transparansi dan akuntabilitas sebuah APBDes dari sebuah desa, seperti yang dilansir di Okezone.com kepala desa Lerpak menyerahkan pengelolaan dan pembelanjaan APBDes Lerpak 2016 yang di duga fiktif (melakukan manipulasi data) seperti pengeluaran pembangunan jalan aspal yang tidak sesuai dengan spesifikasinya yang di laporkannya (Syaiful Islam,2019).

Proses pengelolaan keuangan desa di dasarkan pada prinsip *Good governance* yang transparansi dan akuntabilitas agar keterlibatan lembaga dengan masyarakat berjalan sesuai dengan *Good and Clean governance*. Pemerintah desa wajib membuat APBDes, melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program

dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian, pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepala warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Perencanaan dan penganggaran desa harus sejalan dengan agenda dari otonomi daerah, dan merupakan bagian dari kebijakan yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi dan demokrasi. Kebijakan ini penting karena terdapat tiga alasan yaitu: *Pertama*, sebagai besar warga masyarakat Indonesia hidup di daerah perdesaan, dan desa merupakan pabrik dan kantong orang miskin. *Kedua*, komunitas pedesaan itu terkelompok ke dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom. *Ketiga*, desentralisasi ditingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Perencanaan dan penganggaran desa relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi langsung, dimana warga masyarakat tidak hanya menggunakan haknya, tetapi juga menjadi pihak yang bertindak (warga masyarakat datang untuk membangun ruangnya sendiri dan melakukan perubahan menurut strateginya sendiri).

Penelitian ini dilakukan disalah satu desa yang ada di Sumedang yaitu Desa Karangpakuan di Kecamatan Darmaraja. Desa ini, merupakan Desa tidak terdapat masalah seperti pembayaran pajak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam dana yang diterima dari Provinsi tidak besar dan tidak kecil apabila dibanding dengan desa yang ada di Kecamatan Darmaraja. Berikut merupakan rincian Dana Desa di Kecamatan Darmaraja.

Tabel 1.1 DATA RINCIAN DANA DESA DI KECAMATAN DARMARAJA
TAHUN 2019

No	Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	DBH Retribusi Daerah	TOTAL	Peringkat
1	Darmaraja	Rp 750,782,000	Rp 480,182,000	Rp 4,175,000	Rp 1,235,139,000	10
2	Darmajaya	Rp 787,533,000	Rp 488,737,000	Rp 4,284,000	Rp 1,280,554,000	4
3	Sukamenak	Rp 720,458,000	Rp 471,821,000	Rp 3,193,000	Rp 1,195,472,000	12
4	Sukaratu	Rp 764,972,000	Rp 482,418,000	Rp 3,823,000	Rp 1,251,213,000	6
5	Cikeusi	Rp 743,872,000	Rp 480,037,000	Rp 3,546,000	Rp 1,227,455,000	11
6	Cipeuteuy	Rp 836,578,000	Rp 499,199,000	Rp 3,067,000	Rp 1,338,844,000	1
7	Cieunteung	Rp 823,644,000	Rp 497,187,000	Rp 4,368,000	Rp 1,325,199,000	2
8	Karangpakuan	Rp 755,143,000	Rp 484,468,000	Rp 4,268,000	Rp 1,243,879,000	8
9	Pakualam	Rp 750,954,000	Rp 482,539,000	Rp 3,041,000	Rp 1,236,534,000	9
10	Neglasari	Rp 767,874,000	Rp 484,341,000	Rp 3,594,000	Rp 1,255,809,000	5
11	Tarunajaya	Rp 755,343,000	Rp 488,854,000	Rp 4,717,000	Rp 1,248,914,000	7
12	Ranggon	Rp 794,857,000	Rp 491,149,000	Rp 3,775,000	Rp 1,289,781,000	3
TOTAL		Rp 9,252,010,000	Rp 5,830,932,000	Rp 45,851,000	Rp 15,128,793,000	

Sumber: Pagu anggaran di Kecamatan Darmaraja Tahun 2019 (diolah)

Dilihat dari tabel diatas, Desa Karangpakuan menerima transferan dari Provinsi sebesar Rp 1.243.879.000 jika diliat peringkatnya Desa Karangpakuan berada di peringkat 8 dari 12. Menurut perangkat Desa Karangpakuan, untuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada PAD hanya tahun ini ada peternakan lele di Desa Karangpakuan, jadi dalam setiap tahun Desa Karangpakuan menggunakan

pendapatan dari pusat. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengacu pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang baru dimulai pada tahun 2019. Berdasarkan hasil pra-survei Desa Karangpakuan terdapat kendala-kendala dalam pengelolaan APBDes seperti:

1. Adanya keterlambatan dalam melaporkan RAPBDes ke Kabupaten sehingga pencairan dana terhambat harusnya dibulan Januari sedangkan fakta dilapangan pada bulan Februari. Dalam hal ini di jelaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumedang hanya memverivikasi data-data yang masuk dari desa, desa yang terlambat mungkin adanya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan berkas, yang paling banyak kesalahan yaitu SP tanggal,nomor perbup yang masih lama sementara sudah ada perubahan. Selain itu, surat pengantar dari camat, nomor dan tanggal masih ada kesalahan-kesalahan. Rata-rata keterlambatan desa karena pengesahan APBDes baru bulan kemarin (bulan Maret) dilansir Sumedang.Online (Iwan Rahmat,2020). Menurut Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumedang menyatakan bahwa dalam setiap awal tahun mengingatkan ke semua desa untuk segera melaporkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) karena hampir semua desa terlambat dalam melaporkan Rancangan APBDes. Terlambatnya pencairan dana desa maka akan berpengaruh juga terhadap rencana yang akan dilakukan untuk taun pelaksanaan, adanya pergeseran pelaksanaan dalam kegiatan apabila dananya belum cair.
2. Dalam kegiatan musyawarah Desa Karangpakuan dimulai ditingkat dusun dengan beberapa perwakilan saja, setelahnya di usulkan ke desa. Tetapi, dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat kurang mengetahui apa saja yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Menurut salah satu RT di Desa Karangpakuan setiap tahunnya tidak melakukan publikasi Laporan APBDes,

baru tahun ini melakukan publikasi, walau hanya di mading kantor tidak di tempat strategis yang seluruh masyarakat bisa membacanya.

Terdapat beberapa kendala-kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka peneliti ingin mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh tim pelaksana Desa Karangpakuan, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategi dan tujuan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah sedangkan transparansi sebagai pembuktian telah terjadinya musyawarah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Penelitian yang dilakukan oleh Iqsan (2016), Hasil penelitiannya menunjukan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporam pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengkomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

Peneliti lebih memilih meneliti mengenai akuntabilitas dan transparansi karena penulis ingin mengetahui mekanisme perencanaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta ingin mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangpakuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Tahap Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perencanaan dalam pengelolaan APBDes Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018?
2. Apa saja faktor penghambat dalam perencanaan pengelolaan APBDes Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme perencanaan dalam pengelolaan APBDes Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perencanaan pengelolaan APBDes Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Akademisi
Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam APBDes . Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.
2. Masyarakat
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.
3. Pemerintah
Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.